

TAJUK RENCANA

Memaknai Kebolehan Lepas Masker

PEMERINTAH telah membolehkan masyarakat melepas masker ketika berada di area terbuka, sementara di area tertutup dan transportasi umum tetap diharuskan memakai masker. Begitu pula mereka yang punya komorbid, lansia, serta terkena batuk pilek, disarankan untuk tetap memakai masker.

Pelonggaran tak berhenti sampai di situ, perjalanan domestik dan luar negeri juga tak disyaratkan tes PCR maupun antigen salkank telah mendapatkan vaksinasi lengkap. Kebijakan ini dikeluarkan pemerintah dan langsung disampaikan Presiden Jokowi setelah melihat situasi Covid-19 yang terkendali.

Kebijakan ini tentu disambut antusias masyarakat. Mereka yang selama ini ketika berada di area terbuka memakai masker, kini diperbolehkan untuk membuka maskernya. Apakah dengan demikian pandemi sudah berakhir? Jawabnya, kita sedang memasuki masa transisi dari pandemi menuju endemi.

Artinya, sebenarnya pandemi ini belum berakhir, melainkan sedang masa transisi. Justru masa transisi inilah yang menentukan langkah kita apakah akan berhasil menuju endemi atau sebaliknya. Karena itu, masa transisi ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk tidak mengabaikan protokol kesehatan ketika berada di ruangan tertutup atau transportasi massal. Sebab, dua tempat itulah yang selama ini rawan terjadi penularan Covid-19.

Kiranya kita jangan salah memaknai apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Langkah antisipatif harus tetap kita lakukan. Apalagi, selama ini kita telah belajar menerapkan pola hidup sehat dan

menjadikan masker sebagai gaya hidup kita. Diperbolehkannya melepas masker di area terbuka tentu jangan diartikan sebagai keharusan atau anjuran untuk melepas masker, melainkan sebagai bentuk kebolehan.

Tentu akan lebih aman kalau kita tetap memakai masker, meskipun diperbolehkan untuk tidak. Bahkan, tanpa pandemi sekalipun, menggunakan masker ketika berada di area publik, di jalan misalnya, justru dianjurkan untuk melindungi kita dari debu dan segala macam partikel berbahaya yang bisa masuk ke saluran pernapasan.

Sayangnya, masih ada yang keliru memahami kebolehan tidak memakai masker di area publik, bahkan ada yang menganggap seolah kita sudah bebas masker di manapun berada. Lihatlah di beberapa tempat tertutup, masih banyak dijumpai orang tidak mengenakan masker, dan hal itu seolah dibiarkan.

Sebenarnya, kebijakan lepas masker di ruang terbuka ini, akan lebih 'save' kalau ditunda pekan depan, menunggu efek mudik, apakah berpengaruh terhadap penyebaran Covid-19 atau tidak. Sebab, efek mudik belum bisa diketahui saat ini, melainkan baru pekan depan. Kita hanya berharap mudah-mudahan efek mudik tidak berpengaruh signifikan terhadap penyebaran Covid-19.

Prinsipnya, agar kita berhasil melewati masa transisi dari pandemi menuju endemi dengan mulus, butuh kedisiplinan dan kesadaran diri untuk menerapkan pola hidup sehat dan protokol kesehatan. Hemat kita, protokol kesehatan tetap diperlukan, baik ada maupun tidak ada pandemi, meski dengan tingkatan yang berbeda. □

Pemilu Inklusif dan Menghapus Diskriminasi

DALAM Global Disability Summit 2022 di Norwegia, bersama sejumlah organisasi penyandang disabilitas di Indonesia dan empat kementerian/lembaga (Kemendagri, Ombudsman, Kemendagri dan BRIN), KPU meneguhkan komitmen. Tentu komitmen untuk menghapus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, khususnya melalui peningkatan partisipasi penyandang disabilitas di Indonesia dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.

Komitmen ini sejalan dengan Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi Indonesia, terutama pasal 29. Pasal ini mewajibkan negara untuk menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik secara penuh dan efektif. Baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas. Termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Menitipkan Agenda

Komitmen KPU dipertajam kembali dalam kegiatan diseminasi komitmen kementerian dan lembaga terhadap *global disability summit* yang diselenggarakan Perkumpulan Ohana di Yogyakarta, 11-14 Mei 2022. Sejumlah organisasi penyandang disabilitas dari berbagai penjuru tanah air menitipkan agenda-agenda pemilu inklusif. Antara lain: pelibatan organisasi penyandang disabilitas dalam lini perencanaan kegiatan dan tahapan pemilu maupun sosialisasi dan pendidikan pemilih. Kemudian pencatatan data pemilih yang lebih akurat dan valid bagi penyandang disabilitas.

Titipan agenda tersebut sejatinya menguatkan kebijakan KPU selama ini yang secara implementatif telah mengupayakan secara sungguh-sungguh pemilu inklusif. Sebuah pemilu yang memberi kesempatan setara kepada siapapun yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam pemilu. Tanpa diskriminasi dan hambatan apapun.

Pertama, dalam kerangka menjamin hak memilih warga, KPU melakukan pendaftaran pemilih terhadap penyandang disabilitas dengan mencantumkan jenis disabilitasnya. Pencatatan dilakukan

Hamdan Kurniawan

secara door to door oleh petugas pemutakhiran data pemilih. Meski diverifikasi langsung, data pemilih disabilitas belum menjamin seratus persen tercatat. Ada kendala yang bisa berasal dari petugas ketika memasukkannya sebagai pemilih namun alpa mencatat jenis disabilitas. Dapat juga berasal dari keluarga yang enggan menyampaikan bahwa ada anggota keluarganya yang menyandang



KR-JOKO SANTOSO

disabilitas. Pencatatan jenis disabilitas sangat penting untuk mengidentifikasi kebutuhan pemilih.

Tantangan lain dalam pendataan pemilih adalah pelabelan negatif di masyarakat terhadap penyandang disabilitas sebagai orang yang tidak patut didaftar sebagai pemilih. Karena dianggap tidak akan mampu menggunakan hak pilih, khususnya mereka yang menyandang disabilitas mental. Padahal konstitusi menjamin bahwa mereka tetap wajib didaftar sebagai pemilih dan berhak menggunakan hak suaranya.

Kedua, aksesibilitas bagi difabel dalam menyalurkan suara. KPU telah menerbitkan regulasi yang secara rinci mengatur pembuatan tempat pemungutan suara yang akses dan mudah dijangkau. Diperbolehkannya pendamping bagi difabel yang membutuhkan bantuan saat pen-

coblosan, penyediaan template surat suara dengan huruf *braille*, bahkan membekali petugas KPPS cara memberikan *treatment* sesuai kebutuhan pemilih penyandang disabilitas. Meski telah diatur secara rinci, namun dalam implementasinya tetap diperlukan pemantauan dan evaluasi. Karena praktik penyelenggaraan pemilu selama ini masih ditemukan kurangnya aksesibilitas dalam pelayanan hak pilih di sejumlah TPS.

Perspektif Disabilitas

Ketiga, dibukanya kran keterlibatan penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Selain sebagai pemilih, terbuka ruang bagi penyandang disabilitas untuk terjun sebagai penyelenggara pemilu di semua tingkatan, baik badan *ad hoc* KPPS, PPS, PPK, hingga penyelenggara permanen KPU agar makin nyata praktik kebijakan pro difabel. Juga, sebagai pihak yang membantu melakukan pendidikan pemilih khususnya bagi komunitas penyandang disabilitas. Pelibatan dalam dua ranah tersebut, tidak saja menempatkan orang di tempat yang tepat namun juga mempromosikan perspektif disabilitas bagi banyak kalangan dan masyarakat luas. Semakin banyak difabel terlibat, maka semakin prospektif proses membangun perspektif disabilitas.

Kita berharap, selain memenuhi hak politik penyandang disabilitas, pemilu yang melibatkan jutaan manusia, dapat menjadi media untuk memperluas dan mengukuhkan perspektif disabilitas di tengah masyarakat. □

*) **Hamdan Kurniawan MA**, Ketua KPU DIY Periode 2018-2023

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirim artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email: opini-kr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Musala di Hartono Mall

JALAN-JALAN di mall, kadang kulakuban bersama teman kalau sedang merefresh pikiran, setelah jenuh dengan tugas akhir. Bukan merupakan hobby yang harus setiap hari kulakukan. Apalagi jalan-jalan sehabian di mall, bukanlah sebuah kebutuhan bagiku.

Dari semua itu membuatku tahu, mana mall yang dilengkapi kebutuhan melaksanakan salat. Bagi seorang muslim, ini justru menjadi sebuah kebutuhan agar bisa santai jalan-jalannya meski hanya sesekali. Dan kenyataannya bisa melihat banyak realita. Ada mall

dengan musala kecil di basement. Ada yang seperti setiap lantai ada musala kecil dan juga ada yang di lantai atas. Namun dari semua itu yang acap menjadi persoalan adalah tempat wudhu yang tidak terpisah.

Namun ada yang beda di Hartono Mall. Karena disitu disediakan sebuah musala yang cukup luas di lantai 1, dan tempat wudhu lelaki & perempuan yang terpisah. Ini membuat saya dan teman-teman merasa nyaman jalan-jalan di situ. Terimakasih. □

Fariza, mahasiswa UII

Berharap Yogya Segera Pulih Total

PELONGGARAN pengenaan masker di area terbuka telah disampaikan Presiden Jokowi. Ini sesuatu yang cukup melegakan. Kita berharap bahwa sesegera mungkin pandemi ini sudah berubah menjadi endemik. Sehingga suasananya menjadi lebih menenteramkan lagi. Meski sekarang, masker sudah menjadi kebutuhan bahkan kelengkapan. Karena ke luar rumah tanpa masker seakan menjadi ada yang kurang.

Saat ini beberapa perguruan tinggi di DIY juga sudah membuka kembali kampus bahkan perkuliahan semester genap tahun ajaran 2021-2022 sudah dimulai. Sistem

pembelajaran tatap muka (PTM) juga sudah mulai diberlakukan. Jika demikian, tentunya mahasiswa sudah pada pulang kembali ke Yogya dan siap melaksanakan (PTM). Harapannya, sector ikutan kembalinya mahasiswa juga akan bergairah kembali: pemondokan, warung, transportasi, fotocopy, laundry dan lainnya.

Libur lebaran kemarin tampaknya aman-aman saja. Semoga pelonggaran masker dan kembalinya PTM di lingkungan pendidikan tinggi akan segeera memulihkan membuat Yogya pulih total. □

Tiwi, 0818278xxxx

Mudik, Upaya Penyegaran Mental

LEBARAN tahun ini terasa berbeda. Suasana Idul Fitri 2022 terasa lebih meriah dengan banyaknya Umat Muslim pulang kampung. Semua jalur transportasi mengalami peningkatan. PT ASDP Indonesia Ferry menyeberangkan 37,7 ribu kendaraan dan 156 ribu penumpang, naik 48%. PT KAI mengangkut 1,8 juta dalam sepuluh hari terakhir (KR, 30/4). Banyaknya jumlah mudik di tahun ini bak gelombang yang tak terdendam setelah 2 tahun pandemi covid-19.

Perjalanan yang memakan waktu berlipat juga onkos perjalanan yang tidak sedikit. Lelah selama perjalanan tidak menjadi penghalang keinginan untuk bersilaturahmi dengan orangtua, keluarga, dan tetangga. Kangen suasana rumah yang terobati dengan mudik seperti malam takbiran, masak dan makan bersama, saling bermaafan, sungkeman, menjadi obat yang bisa merefresh kesehatan mental.

Mudik adalah epulang kampung. Mudik lebaran dilakukan masyarakat Indonesia secara umum, tidak selalu yang beragama Islam. Mereka yang berada di perantauan atau bertempat tinggal jauh dari kampung halaman menjelang perayaan Idul Fitri berbondong-bondong pulang. Mudik ini biasanya dilakukan pada tujuh hari sebelum lebaran hingga tujuh hari sesudahnya (Soebaykto, 2011). Mudik dilakukan untuk dapat merayakan Idul Fitri atau Lebaran bersama dengan keluarga. Dengan berbagai dinamikanya, apa saja makna arti penting lebaran bagi pemudik, khususnya dari perspektif psikologis?

Makna lebaran dari sisi perspektif psikologis dapat tertinjau dari aspek afeksi, emosi maupun sosial. Dorongan besar yang dimiliki oleh pemudik mencerminkan betapa bahagiannya bisa berkumpul bersama

Sri Muliati Abdullah

keluarga, orangtua, termasuk teman dan tetangga di kampung halaman.

Berkumpul menjadikan ikatan kasih sayang dalam keluarga menjadi hal yang semakin menghidupkan rasa memiliki dalam keluarga. Dalam lingkup sosial yang lebih luas, pulang kampung juga menjadi ajang untuk tetap menyambung tali silaturahmi dengan tetangga sekitar.

Obat Kebahagiaan

Pulang ke kampung halaman adalah hal yang dapat menjadi obat kebahagiaan, menimbulkan perasaan berharga dan memunculkan perasaan senang. Ketika berkumpul, suasana rumah seringkali terisi dengan senda gurau, saling berbagi cerita. Hal ini mampu melepas segala penat dan stres yang selama ini ada.

Secara psikologis, seorang pemudik juga dapat merasakan berharga karena dapat memberi sesuatu ke keluarga dan lingkungannya walaupun mungkin ada yang sebatas dalam bentuk oleh-oleh atau uang THR. Menurut Fuad (2011), hal tersebut dapat memunculkan motivasi untuk mengubah diri, bekerja secara lebih keras demi memberi kontribusi yang lebih besar pada keluarga.

Secara emosi, maaf memaafkan juga merupakan proses psikologis yang akan menjadikan seseorang akan merasa jauh lebih baik secara mental. Selain itu rasa syukur atas kesempatan dapat mudik lebaran, bertemu dengan keluarga dengan segala suasana yang membahagiakan dapat membawa efek yang dapat menyehatkan jiwa bagi pemudik.

Mudik lebaran tahun menjadikan mental pemudik dan keluarga yang dikunjungi secara psikologi menjadi semakin *fresh*. Secara kolektif, terbangun kesehatan mental. Bahkan, tidak sedikit individu yang terguhag keberanian diri untuk menetapkan target mengubah diri menjadi pribadi yang lebih matang. Meksipun mudik terkesan rutinitas, namun dalam perspektif yang luas, tradisi ini membangun kekuatan dan kecerdasan sosial. Pengorbanan secara ekonomi, fisik, dan waktu akan tertunaikan karena terpujuknya mental dan sikap yang humanis, sebagai modal untuk mempertahankan produktivitas kehidupan setahun kedepan. □

*) **Dr Sri Muliati Abdullah**, psikolog, Dosen Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Pojok KR

Pemerintah bolehkan masyarakat lepas masker di area terbuka.

-- Jangan di-'gebyah uyah' di semua tempat.

Ditemukan kasus PMK di DIY, perke-
tat lalu lintas ternak.

-- Bisnis hewan ternak bakal ter-
dampak.

Petugas harus beri layanan terbaik
untuk jemaah haji.

-- Tidak sekadar diimbau agar se-
lalu ikhlas dan sabar.

Beraba

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).